

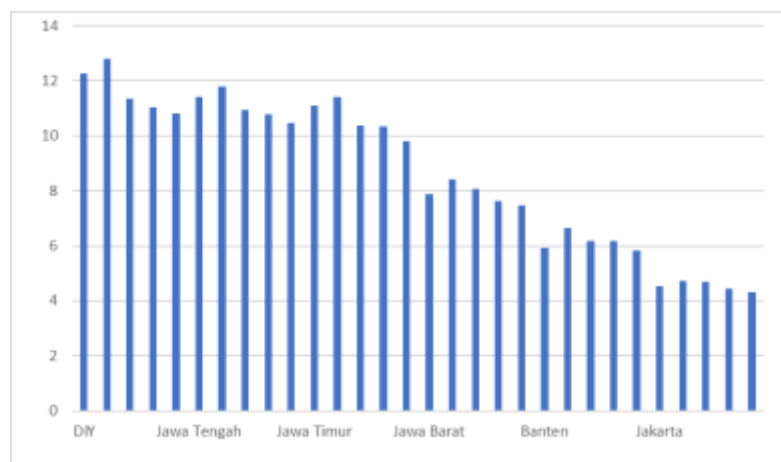
# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai sebuah negara yang sedang berkembang, kemiskinan menjadi isu yang kuat di Indonesia. Kemiskinan merujuk pada kekurangan harta yang berhubungan dengan kondisi kehidupan yang tidak layak bagi individu atau keluarga akibat kebutuhan yang tidak terpenuhi (Suryani & Ismaulina, 2019). Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), tujuan 'Tanpa Kemiskinan' ditetapkan sebagai hal yang harus diperbaiki. Ini berarti, Indonesia perlu memenuhi sasaran yang ditentukan oleh PBB untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 mengenai Percepatan Penanganan Kemiskinan, pemerintah mendirikan Tim Nasional Percepatan Penanganan Kemiskinan (TNP2K).

Kemiskinan merupakan suatu isu yang sangat serius berkaitan dengan ketidakpastian dalam ekonomi dan memerlukan strategi jangka panjang untuk mengatasinya. Kondisi ini muncul saat individu atau kelompok tidak mampu mencapai tingkat kesejahteraan yang dianggap sebagai syarat minimum untuk memenuhi standar hidup yang diperlukan. Kemiskinan muncul akibat dari keterbatasan individu tertentu dalam memenuhi kebutuhannya. Permasalahan ini termasuk yang paling rumit di dunia, terutama di negara-negara berkembang dengan populasi besar seperti Indonesia (Abdillah & Ramadhan, 2023).



Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

**Gambar 1.1 Kemiskinan di Pulau Jawa 2020-2024 (%)**

Berdasarkan gambar 1.1 tingkat kemiskinan di Pulau Jawa memperlihatkan adanya perbedaan yang cukup nyata antar provinsi, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Pola tersebut mengindikasikan bahwa variasi tingkat kemiskinan antar wilayah dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas ekonomi, tingkat pembangunan, derajat urbanisasi, serta ketersediaan akses terhadap lapangan kerja dan layanan publik.

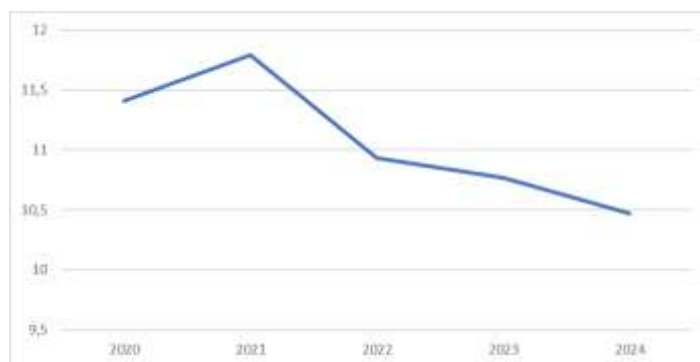
Kondisi ini sejalan dengan temuan empiris yang menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial-ekonomi, seperti tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, dan karakteristik regional, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa. Selain itu, hasil penelitian sebelumnya juga menegaskan bahwa tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dipengaruhi oleh variabel pengangguran terbuka, IPM, dan pertumbuhan ekonomi, yang mencerminkan adanya ketimpangan pembangunan internal dalam satu kawasan pulau (Lestari & Imaningsih, 2022).

Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah merupakan permasalahan sosial ekonomi yang bersifat multidimensional dan masih menjadi tantangan signifikan dalam proses pembangunan daerah. Meskipun tingkat kemiskinan menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah provinsi.

Ketimpangan pembangunan antarwilayah, perbedaan struktur ekonomi, serta dominasi sektor pertanian dan pekerjaan informal menjadi faktor yang mempertahankan kerentanan ekonomi masyarakat. Sebagian besar penduduk miskin masih memiliki daya beli yang rendah dan bergantung pada pemenuhan kebutuhan pokok, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga pangan dan energi (Prasada et al., 2020).

Di sisi lain, efektivitas kebijakan sosial yang terbatas, rendahnya kualitas sumber daya manusia di beberapa daerah, serta akses yang belum merata terhadap layanan keuangan formal turut memperlambat upaya pengentasan kemiskinan (Yudhistira et al., 2020).

Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan di Jawa Tengah perlu ditangani melalui pendekatan pembangunan yang inklusif, terpadu, dan berkelanjutan guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah provinsi.



Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

**Gambar 1.2 Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 2020-2024 (%)**

Berdasarkan gambar 1.2 kemiskinan masih menjadi persoalan sosial ekonomi yang mendapat perhatian besar dalam proses pembangunan daerah, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Terlihat bahwa tingkat kemiskinan sempat meningkat pada tahun 2021 hingga mencapai sekitar 11,8 persen akibat dampak pandemi COVID-19 yang menghambat aktivitas ekonomi, menurunkan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan jumlah pengangguran di sektor informal.

Pada periode berikutnya terjadi penurunan secara bertahap hingga sekitar 10,5 persen pada tahun 2024, kondisi tersebut tetap menunjukkan adanya tantangan besar dalam menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan. Temuan Mahardika dan Kusuma (2022) memperkuat hal ini dengan menunjukkan bahwa kemiskinan di Jawa Tengah dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas tenaga kerja yang masih lemah, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah memerlukan strategi kebijakan yang lebih menyeluruh dan terintegrasi tidak hanya berfokus pada pemulihan ekonomi pascapandemi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perluasan sektor ekonomi yang beragam, dan pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah provinsi (Yudhistira et al., 2020).

Teori pembangunan ekonomi mulai berkembang pada era 1950-an melalui pemikiran para ekonom seperti Ragnar Nurkse (1953), W. Arthur Lewis (1954), dan Gunnar Myrdal (1957), yang menekankan bahwa pembangunan tidak semata-mata berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup, pemerataan pendapatan, dan penurunan kemiskinan secara berkelanjutan. Todaro dan Smith (2011) menegaskan bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensional yang melibatkan perubahan struktur sosial, pola pikir masyarakat, serta institusi ekonomi guna meningkatkan tingkat kesejahteraan.

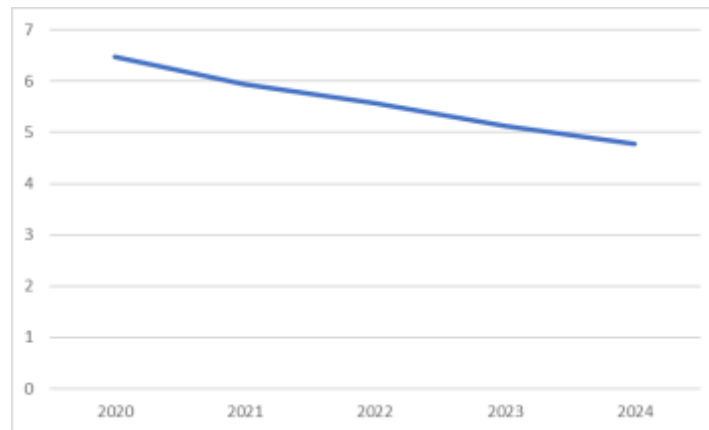
Pandangan tersebut sejalan dengan teori lingkaran setan kemiskinan yang dikemukakan oleh Nurkse (1953), yang menjelaskan bahwa kemiskinan bersifat saling memperkuat melalui keterkaitan antara pendapatan rendah, tabungan rendah, investasi rendah, dan produktivitas rendah. Dengan demikian, teori pembangunan ekonomi memberikan landasan konseptual bagi upaya memutus rantai kemiskinan melalui perumusan kebijakan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan. Menurut Arif (2025), kemiskinan di Indonesia memiliki kecenderungan terakumulasi pada wilayah tertentu sebagai akibat dari ketimpangan pembangunan dan akses terhadap aktivitas ekonomi.

Berdasarkan temuan tersebut, fenomena kemiskinan di Jawa Tengah dapat dipahami sebagai proses yang bersifat kumulatif, bukan semata-mata dipicu oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga terbentuk melalui interaksi berbagai faktor sosial dan ekonomi meliputi tingkat pengangguran, kualitas sumber daya manusia, bantuan sosial, serta akses terhadap layanan keuangan yang secara simultan dapat

memperkuat ataupun melemahkan lingkaran kemiskinan tersebut (Handayani, 2023).

Salah satu faktor yang memiliki kaitan dengan kemiskinan adalah pengangguran. Menurut teori pasar tenaga kerja yang dikembangkan oleh Lewis (1954) surplus tenaga kerja di sektor tradisional merupakan faktor utama yang mendorong meningkatnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) karena kapasitas sektor modern belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, kondisi tersebut memperburuk tingkat kesejahteraan masyarakat, sebab tenaga kerja yang tidak terserap hanya memperoleh pendapatan pada tingkat subsisten atau bahkan tidak memiliki pendapatan, yang pada akhirnya menekan pendapatan rumah tangga (Sukirno, 2016).

Dengan demikian, struktur ekonomi dualistik sebagaimana dijelaskan oleh Lewis tidak hanya menyebabkan tingginya TPT, tetapi juga memperdalam kemiskinan, mengingat terbatasnya akses terhadap pekerjaan produktif menghambat peningkatan pendapatan dan membuat rumah tangga rentan terjebak dalam siklus kemiskinan yang berkelanjutan. Sejalan dengan penelitian Prasetya dan Sumanto (2022) menemukan bahwa peningkatan tingkat pengangguran berdampak signifikan terhadap naiknya angka kemiskinan, akibat tidak optimalnya penyerapan surplus tenaga kerja oleh pasar tenaga kerja sehingga sebagian besar rumah tangga hanya memperoleh pendapatan pada tingkat subsisten. Temuan tersebut sejalan dengan model dual ekonomi Lewis, yang menegaskan bahwa keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang produktif menjadi determinan utama yang memperdalam kerentanan ekonomi masyarakat.



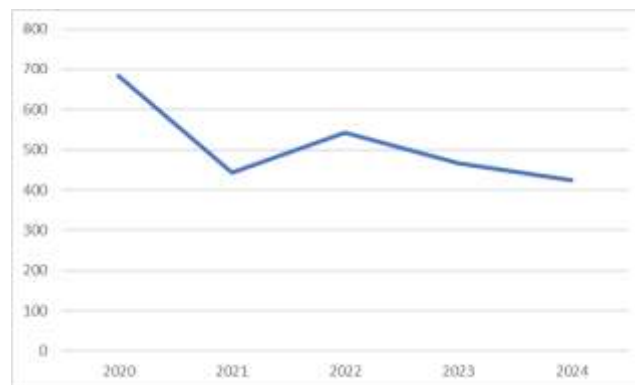
Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

**Gambar 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah 2020-2024 (%)**

Berdasarkan gambar 1.3 memperlihatkan tren penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, TPT berada di kisaran 6-7% akibat dampak pandemi COVID-19 yang menekan aktivitas ekonomi dan lapangan kerja, khususnya di sektor informal. Namun, sejak 2021 hingga 2024, TPT menurun secara konsisten hingga sekitar 4-5%, menandakan adanya pemulihan ekonomi dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor industri, perdagangan, dan jasa. Meski demikian, struktur ketenagakerjaan di Jawa Tengah masih didominasi oleh sektor informal dengan produktivitas rendah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Agustina (2020) yang menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja formal guna menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi dan menekan angka kemiskinan (Muara et al., 2024).

Selain itu, belanja sosial memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengurangi kemiskinan karena menjadi alat bagi pemerintah dalam anggaran untuk membagikan ulang pendapatan dan memperkuat perlindungan bagi warga yang berpenghasilan rendah. Berdasarkan teori redistribusi pendapatan yang dikemukakan oleh Musgrave (1959), pemerintah memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan ekonomi melalui kebijakan fiskal, terutama lewat peningkatan belanja sosial dan pemberian subsidi. Belanja sosial yang tepat sasaran diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Pandangan ini sejalan dengan hasil penelitian Miar dan Yunani (2023) dalam yang menemukan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor sosial, pendidikan, dan kesehatan berpengaruh negatif serta signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.



Sumber: DJPK (Data Diolah)

**Gambar 1.4 Belanja Sosial di Provinsi Jawa Tengah 2020-2024 (Milyar Rupiah)**

Berdasarkan gambar 1.4 belanja sosial di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024 memperlihatkan pola fluktuatif yang mencerminkan perubahan arah kebijakan fiskal daerah dalam menghadapi dinamika sosial dan ekonomi

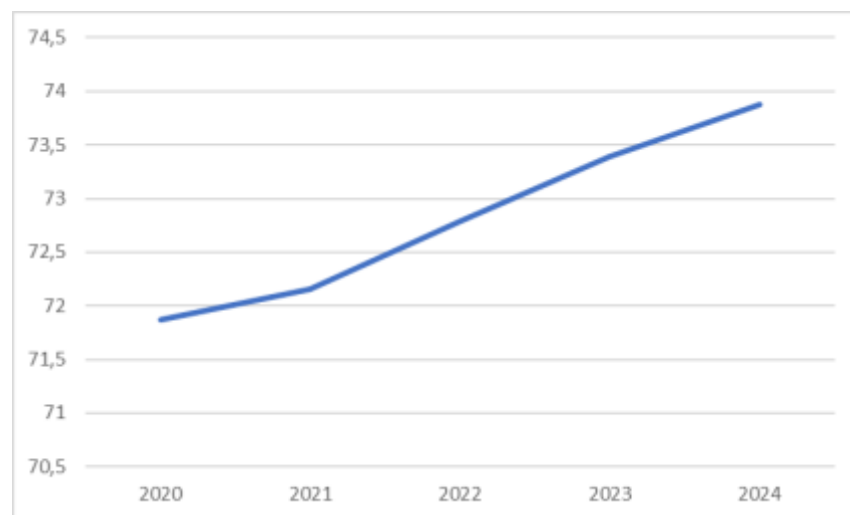
masyarakat. Pada tahun 2020, nilai belanja sosial mencapai puncak sekitar 700 miliar rupiah karena meningkatnya berbagai program bantuan selama pandemi COVID-19, seperti bantuan tunai dan subsidi kebutuhan pokok. Selanjutnya, pada 2021 terjadi penurunan tajam hingga sekitar 450 miliar rupiah akibat pergeseran anggaran menuju program pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Tahun 2022 mengalami sedikit kenaikan hingga mencapai 550 miliar rupiah sebagai bentuk dukungan terhadap daya beli masyarakat, namun kembali menurun pada 2023–2024 ke kisaran 430 miliar rupiah sebagai konsekuensi dari normalisasi fiskal dan fokus pada pembangunan produktif.

Menurut Pausan Ramli & Bato (2024) yang menemukan bahwa peningkatan belanja sosial berperan signifikan dalam menekan angka kemiskinan, sedangkan pengurangannya dapat memperlambat penurunan kemiskinan. Oleh karena itu, tren menurunnya belanja sosial di Jawa Tengah menegaskan pentingnya kebijakan sosial yang konsisten dan berkelanjutan agar efektivitas program pengentasan kemiskinan tetap terjaga meskipun terjadi penyesuaian anggaran.

Salah satu faktor lain yang juga mempengaruhi terjadinya kemiskinan adalah indeks pembangunan manusia. Berdasarkan Teori Pembangunan Manusia yang diperkenalkan oleh Amartya Sen (1999) dalam buku yang berjudul *Development as Freedom*, kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh pendapatan yang rendah, tetapi juga oleh keterbatasan kemampuan seseorang dalam mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi yang baik. Jika IPM meningkat, hal ini menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat membaik, yang

pada gilirannya meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan membuka lebih banyak peluang untuk keluar dari kemiskinan.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Haidir dan Setyari (2023) yang menunjukkan bahwa peningkatan akses pendidikan dasar memiliki peran penting dalam membantu masyarakat keluar dari jebakan kemiskinan di Indonesia. Dengan menerapkan pendekatan capability approach yang dikemukakan oleh Amartya Sen, studi ini menggarisbawahi bahwa pendidikan tidak sekadar berperan sebagai elemen ekonomi, melainkan juga sebagai alat pemberdayaan yang dapat meningkatkan kesempatan dan kebebasan individu dalam menentukan tujuan hidupnya. Hasil ini sejalan dengan riset yang mengindikasikan bahwa peningkatan pendidikan sangat berpengaruh dalam memperluas kemampuan, meningkatkan kebebasan memilih, serta memberikan akses kepada peluang sosial dan ekonomi yang lebih baik (Robeyns, 2006).



Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

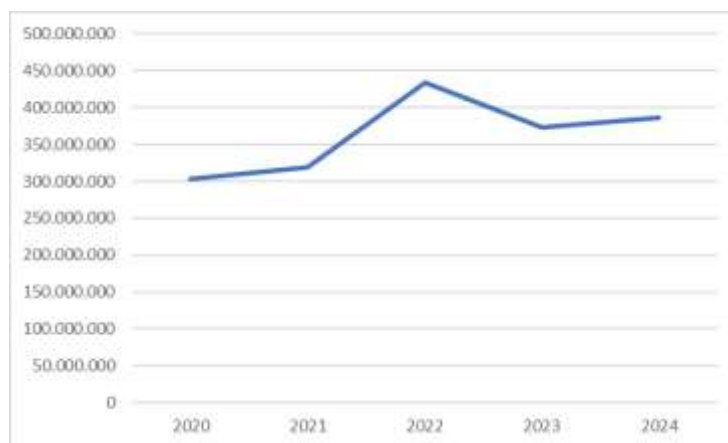
**Gambar 1.5 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah 2020-2024 (Poin)**

Berdasarkan gambar 1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan yang stabil, dari sekitar 72,0 pada 2020 menjadi 74,0 pada 2024. Kenaikan ini menandakan adanya kemajuan dalam kualitas hidup masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan taraf hidup. Peningkatan IPM mengindikasikan bahwa masyarakat Jawa Tengah semakin mampu memperoleh akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Mahara dan Fauzan (2021) di mana ditemukan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Penelitian tersebut menegaskan bahwa peningkatan IPM, terutama melalui sektor pendidikan dan kesehatan, mampu mempercepat penurunan kemiskinan di daerah tersebut. Oleh karena itu, peningkatan IPM sebagaimana tergambar dalam grafik ini menjadi bukti empiris bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia berperan penting dalam menekan kemiskinan dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Jawa Tengah (Handayani, 2023).

Selain IPM, jumlah kredit berhubungan erat dengan tingkat kemiskinan, karena semakin mudah akses masyarakat terhadap kredit akan menambah kapasitas modal usaha, mendorong kegiatan ekonomi yang produktif, serta memperluas peluang kerja, sehingga pada gilirannya berperan dalam mengurangi angka kemiskinan. Menurut teori *financial deepening* yang dikembangkan oleh McKinnon & Shaw (1973) peningkatan jumlah kredit mencerminkan pendalaman

intermediasi keuangan yang memperkuat penyaluran dana ke sektor produktif, sehingga perluasan akses kredit dapat meningkatkan investasi, produktivitas, dan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya berkontribusi pada penurunan kemiskinan secara lebih inklusif. Peningkatan akses kredit dapat menurunkan kemiskinan karena kredit memperkuat modal usaha dan membuka peluang ekonomi, sehingga penyaluran kredit yang lebih besar menjadi instrumen penting dalam mempercepat pengentasan kemiskinan melalui perluasan inklusi keuangan (Fauzan et al., 2020).



Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

**Gambar 1.6 Jumlah Kredit di Provinsi Jawa Tengah 2020-2024 (Juta Rupiah)**

Berdasarkan gambar 1.5 jumlah kredit di Provinsi Jawa Tengah periode 2020-2024, terlihat adanya tren fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang mencerminkan pertumbuhan aktivitas ekonomi serta perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Kondisi tersebut menunjukkan peran strategis lembaga keuangan dalam mendorong sektor-sektor produktif, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Meskipun sempat mengalami penurunan, tren kredit kembali

menunjukkan pemulihan seiring dengan stabilisasi ekonomi dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

Sejalan dengan temuan penelitian Fitriatinnisa dan Khoirunurrofik (2021) yang mengemukakan bahwa peningkatan akses terhadap layanan keuangan, terutama melalui penyaluran kredit, memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan jumlah kredit di Jawa Tengah dapat diinterpretasikan sebagai indikator penting yang mencerminkan penguatan inklusi keuangan serta kontribusinya dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah masih menjadi perhatian utama meskipun secara keseluruhan menunjukkan penurunan, karena disparitas kesejahteraan antar kabupaten/kota tetap tinggi akibat ketidakmerataan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan keuangan. Kondisi ini menegaskan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan tidak dapat bertumpu semata pada pertumbuhan ekonomi, tetapi harus mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi lain seperti kualitas sumber daya manusia, ketersediaan lapangan kerja, efektivitas program bantuan sosial, serta akses terhadap pembiayaan. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada variabel makro seperti IPM, tingkat pengangguran terbuka, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi, sementara indikator inklusi keuangan seperti jumlah kredit masih relatif jarang dianalisis secara bersamaan dengan faktor ekonomi dan belanja pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki *novelty* dengan menekankan variabel tersebut serta menyediakan analisis komprehensif terhadap “Determinasi Faktor Sosial Ekonomi terhadap Kemiskinan

di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2022-2024”, sehingga dapat memberikan kontribusi empiris untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang diambil untuk penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka, belanja sosial, indeks pembangunan manusia, dan jumlah kredit secara parsial terhadap kemiskinan kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2022-2024 ?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka, belanja sosial, indeks pembangunan manusia, dan jumlah kredit secara bersama-sama terhadap kemiskinan kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2022-2024 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka, belanja sosial, indeks pembangunan manusia, dan jumlah kredit secara parsial terhadap kemiskinan kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2022-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka, belanja sosial, indeks pembangunan manusia, dan jumlah kredit secara bersama-sama terhadap kemiskinan kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2022-2024.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya terkait analisis faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan, serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan guna menurunkan tingkat kemiskinan.

## **1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah dengan periode waktu yang diatur berdasarkan ketersediaan serta kelengkapan data untuk penelitian. Pemilihan lokasi dan waktu penelitian dilakukan secara terencana untuk menjamin bahwa data yang digunakan tepat, akurat, serta dapat mencerminkan kondisi nyata sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga mendukung proses analisis dan penarikan kesimpulan secara menyeluruh.

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di daerah kabupaten atau kota dalam Provinsi Jawa Tengah pada periode 2022 sampai 2024. Data diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

### 1.5.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian disusun sebagai panduan pelaksanaan setiap tahapan penelitian agar berjalan secara terstruktur dan tepat waktu.

**Tabel 1. 1 Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	2026																			
		2025				Januari				Februari				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan <i>outline</i> dan rekomendasi pembimbing	■																			
2	Konsultasi awal dan menyusun rencana kegiatan		■																		
3	Proses bimbingan untuk menyelesaikan proposal			■																	
4	Seminar Proposal Skripsi				■																
5	Revisi Proposal Skripsi dan persetujuan revisi							■	■												
6	Pengumpulan dan pengolahan data									■	■										
7	Proses bimbingan untuk menyelesaikan Seminar Hasil											■	■								
8	Seminar Hasil													■							
9	Revisi Seminar Hasil dan persetujuan revisi														■						
10	Proses bimbingan untuk menyelesaikan Skripsi															■					
11	Sidang Skripsi																■				
12	Revisi Sidang Skripsi dan persetujuan revisi																	■			